

SKRIPSI

ANA AGUSTINA

**PERLINDUNGAN HUKUM PASIEN DALAM
PELAYANAN KESEHATAN**



**PROGRAM EKSTENSI FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2001**

**PERLINDUNGAN HUKUM PASIEN DALAM
PELAYANAN KESEHATAN**

SKRIPSI

**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS
DAN MEMENUHI SYARAT-SYARAT GUNA
MENCAPAI GELAR SARJANA HUKUM**



Dosen Pembimbing,

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Handayani".

Sri Handayani, S.H., M.Hum.
NIP. 130 809 069

Penyusun,

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Ana Agustina".

Ana Agustina
NIM. 039710184 U

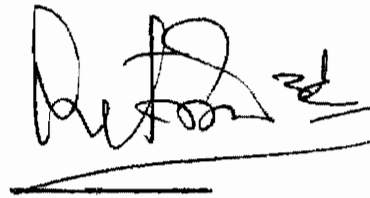
**PROGRAM EKSTENSI FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2001**

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan Panitia Penguji

Pada tanggal : 8 Agustus 2001

Panitia Penguji Skripsi :

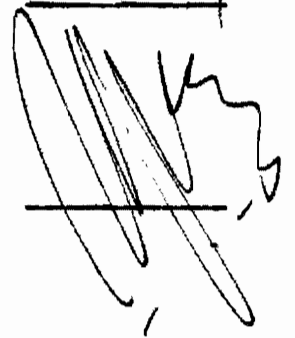
Ketua : Lisman Iskandar, S.H., M.S.



Anggota : 1. Sri Handayani, S.H., M.Hum.



2. Agus Yudha Hernoko, S.H., M.H.



B A B I V

P E N U T U P

4.1 SIMPULAN

- a. Hak dan kewajiban para pihak dalam hubungan hukum kontraktual antara pasien dengan paramedis dalam pelayanan kesehatan telah diatur dalam Undang-Undang nomor 23 tahun 1992 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan-Pemerintah nomor 32 tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan, meskipun pengaturannya masih bersifat implisit dan belum bersifat eksplisit, didalam ketiga peraturan ini hanya memberikan pengaturan hak dan kewajiban para pihak dalam hubungan hukum kontraktual antara pasien dengan paramedis dalam pelayanan kesehatan ini masih bersifat umum dan perlu penafsiran lebih lanjut belum tersistematis dan terperinci. Contoh konkritnya adalah pengaturan dalam Undang-Undang nomor 23 tahun 1992 tentang Kesehatan yang hanya mengatur hal-hal yang bersifat umum saja, dan pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang perlu penafsiran lebih lanjut.
- b. Pasien mempunyai hak atas ganti rugi akibat pelayanan kesehatan yang tidak memadai. Pengaturan mengenai hak pasien atas ganti rugi akibat pelayanan kesehatan yang tidak memadai ini tersebar di beberapa aturan perundang-undangan. Dimana pada masing-masing peraturan ini mempunyai hambatan –hambatan penegakan hukum dalam praktek.

4.2 SARAN

- a. Pemerintah diharapkan lebih bisa proaktif dalam penyediaan sarana dan prasarana perlindungan hukum pasien melalui jalan menempatkan hak dan kewajiban pasien dalam melakukan perbuatan hukumnya dengan semua pihak dalam pelayanan kesehatan dalam suatu wadah perundang-undangan yang lebih tegas, sistematis, tersendiri, dan terperinci yang nantinya diharapkan dapat membingkai perlindungan hukum bagi pasien secara lebih menyeluruh dan aman serta memberikan perlindungan hukum bagi pasien secara maksimal.
- b. Hak pasien atas ganti rugi akibat pelayanan kesehatan yang tidak memadai ini sudah selayaknya mulai diinformasikan keberadaannya pada masyarakat dan pasien pada khususnya. Sudah selayaknya pula pemerintah memberikan suatu ketentuan hukum secara tersendiri dan jelas dengan harapan dapat meminimalisir hambatan-hambatan penegakan hukum dalam praktek dan memudahkan upaya perlindungan hukum pasien dalam pelayanan kesehatan baik secara formil maupun materil